

**FRAUD**  
**Oleh**  
**Eva Ulfa Rahayu., SE**  
**Dosen STIE Syariah Bengkalis**

***Abstract***

*All Organizations, regardless of the type, form, scale of operations and activities are at risk of fraud. One of the factors that may lead to fraud is weak internal controls in the organization. Corporate governance applied in the company, will have a positive impact on reducing the risk of fraud. In the application of corporate governance should be coupled with an effective management system and contains internal control that is run by people who are professional and responsible. Fraud in the company is management's responsibility, but auditors also have the responsibility to find and disclose it by make a plan and audit work to get a reasonable assurance whether financial statement free from material misstatement, neither caused by error nor by irregularities. The evaluation of organizational condition, company's structure and choices made is expected to help disclosing the motivation, opportunity and rationalization beyond the fraud of financial statement.*

***Keywords: Fraud, Independent Auditor, Corporate Governance***

## **A. PENDAHULUAN**

*Fraud* (kecurangan) telah menjadi kekhawatiran terbesar hampir seluruh proses bisnis di berbagai jenis perusahaan. Banyak perusahaansaat ini yang telah mengaplikasikan penggunaan teknologi canggih dalam aktivitasnya, namun masih juga dapat kecolongan aksi *fraudulent* ini, terutama ketika telah terjadi kolusi di dalamnya.

*Fraud* dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun dari luar perusahaan. *Fraud* umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*internal fraud*) yang mengetahui kebijakan dan prosedur perusahaan. *Internal fraud* terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu *Employee fraud* (kecuranganyang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi maupun kelompok) dan *Fraudulent financial reporting* (kecurangan dalam laporan keuangan).

## **B. PEMBAHASAN**

### **Defini *Fraud***

*International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 – *The Auditor's Responcibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements* Paragraf 6 mendefinisikan *fraud* sebagai “.. tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal”. Sedangkan dalam Standar Auditing yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI- KAAP) *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan,

auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu tindakan yang mengandung *fraud* mengakibatkan salah-saji (*misstatement*) dalam pelaporan keuangan.

### Proses, Unsur dan Faktor Pemicu *Fraud*

Proses *fraud* biasanya terdiri dari 3 macam, yaitu:

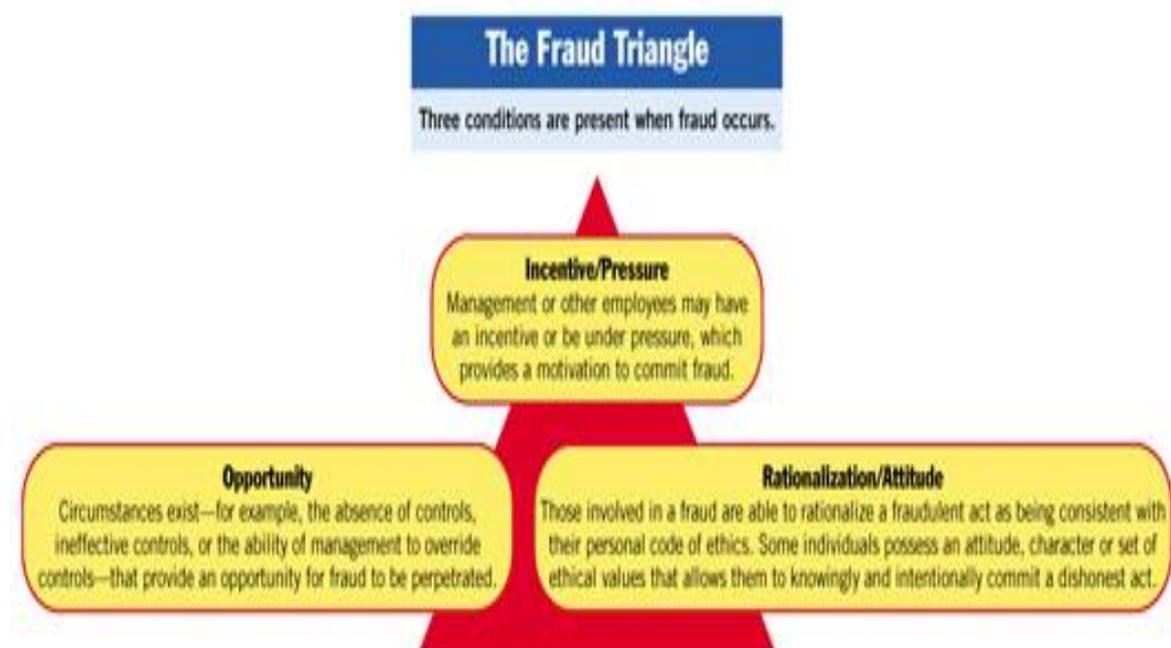
1. pencurian (*theft*) dari sesuatu yang berharga (*cash, inventory, tools, supplies, equipment* atau data),
2. konversi (*conversion*) aset yang dicuri kedalam *cash*, dan
3. pengelabuan/penutupan (*concealment*) tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi.

*Fraud* sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak (*collusion*), tindakan penggelapan/penghilangan atau *false representation* yang dilakukan dengan sengaja, dan menimbulkan kerugian nyata atau potensial atas tindakannya. Pembuktian yang relatif sulit mengakibatkan perusahaan tidak mudah melakukan penutupan terhadap pelaku kasus ini.

Penyebab/faktor pemicu *fraud* dibedakan atas 3 (tiga) hal yaitu :

1. Tekanan (*Unshareable pressure/ incentive*) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Motivasi melakukan *fraud*, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (*values*).
2. Adanya kesempatan / peluang (*Perceived Opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.
3. Rasionalisasi (*Rationalization*) atau sikap (*Attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri.

Ramos (2003), menggambarkan penyebab *fraud* dalam bentuk segitiga *fraud* (*the fraud triangle*), sebagai berikut :



Selain itu, *fraud* dapat dikategorikan atas 3 (tiga) macam sbb. :

1. Penyalahgunaan wewenang/jabatan (*Occupational Frauds*); kecurangan yang dilakukan oleh individu- individu yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Kecurangan Organisatoris (*Organisational Frauds*); kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan/keuntungan organisasi itu.
3. Skema Kepercayaan (*Confidence Schemes*). Dalam kategori ini, pelaku membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban.

### **Jenis-jenis *Fraud***

Jenis-jenis *fraud* yang sering terjadi di berbagai perusahaan pada umumnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam :

1. Pemalsuan (*Falsification*) data dan tuntutan palsu (*illegal act*). Hal ini terjadi manakala seseorang secara sadar dan sengaja memalsukan suatu fakta, laporan, penyajian atau klaim yang mengakibatkan kerugian keuangan atau ekonomi dari para pihak yang menerima laporan atau data palsu tersebut.
2. Penggelapan kas (*embezzlement cash*), pencurian persediaan/aset (*Theft of inventory / asset*) dan kesalahan (*false*) atau *misleading* catatan dan dokumen. Penggelapan kas adalah kecurangan dalam pengalihan hak milik perorangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak milik itu di mana pemilikan diperoleh dari suatu hubungan kepercayaan. Contoh khas adalah *kitting* atau *lapping* dalam skema pencurian uang. *Lapping* adalah seseorang mencuri uang kas yang digunakan oleh *Customer A* untuk membayar piutangnya (*Account Receivable*), dana yang diterima dari *Customer B* digunakan untuk membayar saldo A/R milik *Customer A*, dst (*gali lubang tutup lobang*). Sedangkan *Kitting* adalah seseorang menutupi pencuriannya dengan menciptakan kas melalui transfer uang antar bank (*interbank transfer*). Seseorang menciptakan kas dengan mendepositokan check dari bank A ke Bank B dan menarik uangnya. Karena di Bank A, dananya tidak cukup, maka ybs mendepositokan check dari Bank C ke Bank A sebelum check ke Bank B dikliringkan. Demikian polanya berjalan terus dengan check dan deposit sebanyak diperlukan untuk menjaga agar check-nya tidak sampai ditolak.
3. Kecurangan Komputer (*Computer fraud*) meliputi tindakan ilegal yang mana pengetahuan tentang teknologi komputer adalah esensial untuk *perpetration, investigation* atau *prosecution*. Dengan menggunakan sebuah komputer seorang *fraud perpetrator* dapat mencuri lebih banyak dalam waktu lebih singkat dengan usaha yang lebih kecil. Pelaku *fraud* telah menggunakan berbagai metode untuk melakukan *Computer fraud*.

Pengkategorian *Computer fraud* melalui penggunaan *data processing model*, dapat dirinci sbb :

- a. Cara yang paling sederhana dan umum untuk melaksanakan *fraud* adalah mengubah *computer input*.
- b. *Computer fraud* dapat dilakukan melalui penggunaan sistem (dalam hal ini *Processor*) oleh yang tidak berhak, termasuk pencurian waktu dan jasa komputer serta penggunaan komputer untuk keperluan diluar *job* deskripsi pegawai.

- c. *Computer fraud* dapat dicapai dengan mengganggu *software* yang mengolah data perusahaan atau *Computer instruction*. Cara ini meliputi mengubah *software*, membuat *copy ilegal* atau menggunakannya tanpa otorisasi.
- d. *Computer fraud* dapat dilakukan dengan mengubah atau merusak *data files* perusahaan atau membuat *copy*, menggunakan atau melakukan pencarian terhadap data tanpa otorisasi.
- e. *Computer fraud* dapat dilaksanakan dengan mencuri atau menggunakan secara tidak benar *system output*.

### ***Fraudulent Financial Reporting***

*Fraudulent financial reporting* adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (bias). *Fraudulent financial reporting* yang terjadi di suatu perusahaan memerlukan perhatian khusus dari auditor independen.

Arens (2005 : 310) dalam bukunya yang berjudul “*Auditing & Assurance Services : An Integrated Approach*” edisi ke-10 pada bab 11 tentang *fraud auditing*, antara lain menyebutkan :

*Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities.*

*Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as specialm purpose entities.*

Penyebab *fraudulent financial reporting* umumnya 3 (tiga) hal sbb :

1. Manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan.
2. Salah penyajian (*misrepresentation*) atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan.
3. Salah penerapan (*misapplication*) dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, penyajian (*presentation*) dan pengungkapan (*disclosure*).

*Fraud* laporan keuangan dapat dibedakan antara yang sifatnya inklusif dan eksklusif (Dooley dan Skalak, 2006). *Fraud* dianggap sebagai inklusif apabila laporan keuangan mengandung transaksi atau nilai yang tidak benar. Sedangkan *fraud* yang dianggap eksklusif cenderung menghilangkan transaksi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan. *Fraud* yang inklusif lebih banyak ditemukan dalam praktek.

Contoh *fraud* yang inklusif adalah *overstated* dari piutang dagang akan berdampak pada pos pendapatan.

*Fraudulent financial reporting* juga dapat disebabkan adanya kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Salah satu upaya untuk mencegah adanya kolusi tersebut, maka perlu dilakukan rotasi auditor independen dalam melakukan audit suatu perusahaan.

## **Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen**

### **1. Statement Auditing Standards**

*Auditing Standards Board* (ASB) di Amerika Serikat telah mengeluarkan 10 (sepuluh) standar auditing baru pada bulan April 1988. Beberapa *Statements on Auditing Standards* (SAS) yang cukup penting adalah :

- a. SAS No. 53 tentang "*The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities*," yaitu mengatur tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan (*error*) dan ketidak beresan (*irregularities*).
- b. SAS No. 55 tentang "*Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit*," yang merubah tanggung jawab auditor mengenai internal control. Statement yang baru ini meminta agar auditor untuk merancang pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai (*internal control sufficient*) dalam merencanakan audit. SAS No. 55 kemudian diperbaharui dengan diterbitkan SAS No. 78 pada tahun 1997, dengan mencantumkan definisi ulang pengendalian intern (*redefined internal control*) dengan memasukkan dua komponen yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*) dan penilaian risiko (*risk assessment*) yang merupakan usulan dari the *Treadway Commission*.
- c. SAS No. 61 mengatur tentang komunikasi antara auditor dengan komite audit perusahaan (*Communication with Audit Committees*). Auditor harus mengkomunikasikan dengan komite audit atas beberapa temuan audit yang penting, misalnya kebijakan akuntansi (*accounting policy*) perusahaan yang signifikan, judgments, estimasi akuntansi (*accounting estimates*), dan ketidaksepakatan manajemen dengan auditor.

Selain itu ASB pada Februari 1997 telah mengeluarkan SAS No. 82 yang berjudul *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. Auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. SAS no. 82 menyatakan bahwa setiap melakukan audit auditor harus menilai risiko (*assessment of risk*) kemungkinan terdapat salah saji material (*material misstatement*) pada laporan keuangan yang disebabkan oleh *fraud*. SAS No. 82 akhirnya diperbaharui melalui SAS No. 99 dengan judul yang sama dan mulai diberlakukan efektif untuk audit laporan keuangan setelah tanggal 15 Desember 2002, penerapan lebih awal sangat dianjurkan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna mendapatkan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material,

baik yang disebabkan oleh kekeliruan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Pengaruh SAS No. 99 terhadap tanggung jawab auditor antara lain :

- a. Tidak ada perubahan atas tanggung jawab auditor untuk mendeteksi *fraud* atas audit laporan keuangan.
- b. Tidak ada perubahan atas kewajiban auditor untuk mengkomunikasikan temuan atas *fraud*.
- c. Terdapat perubahan penting terhadap prosedur audit serta dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan.

Dua tipe salah saji (*misstatements*) yang relevan dengan tanggung jawab auditor, yaitu salah saji yang diakibatkan oleh *fraudulent financial reporting* dan salah saji yang diakibatkan oleh penyalahgunaan asset (*misappropriation of assets*).

SAS No. 99 menegaskan agar auditor independen memiliki integritas serta menggunakan kemahiran profesional (*professional skepticism*) melalui penilaian secara kritis (*critical assessment*) terhadap bukti audit (*audit evidence*) yang dikumpulkan.

## 2. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Profesi akuntan publik (auditor independen) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (publik) kepadanya. Tanggung jawab akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Tanggung jawab moral (*moral responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab moral untuk :

- 1). Memberi informasi secara lengkap dan jujur mengenai perusahaan yang diaudit kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut, walaupun tidak ada sanksi terhadap tindakannya.
- 2). Mengambil keputusan yang bijaksana dan obyektif (*objective*) dengan kemahiran profesional (*due professional care*).

- b. Tanggung jawab profesional (*professional responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab profesional terhadap asosiasi profesi yang mewadahnya (*rule professional conduct*).

- c. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*).

Akuntan publik harus memiliki tanggung jawab diluar batas standar profesinya yaitu tanggung jawab terkait dengan hukum yang berlaku.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Auditing Seksi 110, mengatur tentang "Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen". Pada paragraf 2, standar tersebut antara lain dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan

karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi. Selain itu, auditor juga tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Ada beberapa keterbatasan auditor dalam mendeteksi salah saji yang timbul dari *fraud*. Audit dan review yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penentuan apakah suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada umumnya dilakukan melalui pengujian (*testing*) terhadap sejumlah sampel dan bukan pengujian terhadap keseluruhan populasi. Dengan pengujian secara *sampling*, maka tidak dapat dihindari risiko adanya salah saji yang tidak terdeteksi, salah satunya karena *sampling risks*.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, bergantung pula pada kecanggihan pelaku *fraud*, frekuensi dari manipulasi, tingkat kolusi, dan ukuran senioritas yang dilibatkan. Semakin tinggi tingkat kolusi dalam *fraud* dan semakin tinggi tingkat manajemen yang terlibat dalam *fraud* ini, semakin sulit pula untuk mendeteksi *fraud* tersebut oleh auditor.

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh auditor dalam mendeteksi *fraud*:

1. *Effective communication*. Bagaimana auditor dapat berkomunikasi dengan efektif sehingga pihak klien lebih termotivasi untuk menyumbangkan informasi tentang *fraud*. Dengan perkataan lain, diskusi ini merupakan langkah awal bagaimana auditor mendapatkan informasi mengenai *fraud*.
2. *Unpredictability*. Auditor menerapkan unsur *unpredictability* (tidak dapat ditebak) dalam prosedur auditnya, misalnya dengan mengacak sifat, jadwal dan sampel pengujiannya.
3. *Sensitivity*. Auditor perlu mengasah sensitivitasnya akan hal-hal yang sifatnya tidak lazim yang boleh jadi merupakan indikasi akan terjadinya *fraud*. Misalnya memeriksa *manual journal entry*, auditor melihat adanya angka yang secara ganjil jumlahnya bulat; sewaktu dicek lebih lanjut ternyata benar bahwa angka tersebut merupakan angka yang di-*markup* dengan cara dibulatkan ke atas.
4. *Risk Management*. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor perlu menerapkan praktik - praktik manajemen risiko secara lebih baik. Sebagai contoh, auditor akan melakukan penilaian, berdasarkan kriteria tertentu, atas hal-hal sebagai berikut: (1) apakah auditor dapat menerima suatu entitas sebagai kliennya, (2) apakah auditor dapat melanjutkan hubungan profesional dengan kliennya dari satu periode ke periode berikutnya, (3) apakah auditor dapat menerima suatu penugasan tertentu dari kliennya. Dengan perkataan lain, bila auditor meragukan integritas dari manajemen suatu entitas, atau berdasarkan pengalaman entitas tersebut rentan terhadap *fraud*, maka auditor dapat memutuskan untuk secara profesional tidak menerima entitas tersebut sebagai kliennya.

## ***Corporate Governance dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud***

Mengingat *fraud* merupakan permasalahan yang sangat serius, maka peran perusahaan dalam menciptakan ***Good Corporate Governance*** menjadi sebuah tuntutan yang tidak terelakkan. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memproteksi sistem informasinya.

*Corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan, akan membawadampak yang positif terhadap pengurangan risiko terjadinya *fraud*. Dalam penerapannya, *corporate governance* harus dibarengi dengan suatu sistem manajemen yang efektif dan mengandung pengendalian internal yang dijalankan oleh orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan perkataan lain *corporate governance* dapat mengurangi terjadinya *fraud*, jika diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak, baik manajemen, pemegang saham, karyawan, pemasok dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan perusahaan tersebut. Pencegahan dan pendeteksian *fraud* melalui penerapan *corporate governance* mungkin sulit, namun pada akhirnya akan memberikan hasil yang efektif.

Metode yang paling efektif untuk memperoleh *security system* yang mencukupi adalah terletak pada integritas (*integrity*) karyawan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil langkah untuk meningkatkan integritas karyawan dan mengurangi kemungkinan karyawan melakukan *fraud* dengan memperhatikan :

1. *Hiring & firing practices*. Dalam melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif..
2. *Managing disgruntled employees*. Banyak karyawan yang melakukan *fraud* adalah dalam rangka mencari pembalasan atau justice terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah ditimpakan kepada mereka.
3. *Employee training*. *Fraud* jauh lebih sedikit akan terjadi dalam lingkungan dimana para karyawan percaya bahwa keamanan (*security*) merupakan tanggung jawab bersama, baik karyawan maupun manajemen.

Salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan *internal control* yang cukup memadai sehingga *fraud* sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan.

*The National Commission On Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission)* merekomendasikan 4 (empat) tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraudulent financial reporting*, yaitu :

1. Membentuk lingkungan organisasi yang memberikan kontribusi terhadap integritas proses pelaporan keuangan (*financial reporting*).
2. Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mengarah ke *fraudulent financial reporting*.
3. Menilai resiko *fraudulent financial reporting* di dalam perusahaan.
4. Mendisain dan mengimplementasikan *internal control* yang memadai untuk *financial reporting*.

Pembahasan cukup mendalam tentang teknik untuk mencegah dan mendeteksi adanya *fraud* dalam laporan keuangan tertuang dalam buku "*Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*" karangan Rezaee (2002). Dalam buku tersebut

dijelaskan kasus kolapsnya Enron di Amerika Serikat, yang menghebohkan kalangan dunia usaha secara jelas dan lengkap, termasuk adanya praktek kolusi.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. *Fraud* dapat terjadi kapanpun tanpa memandang jenis perusahaannya. Menurut SAS No. 99 dan SPAP, auditor independen bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
- b. *Fraud* merupakan masalah yang serius, maka peran perusahaan dalam menciptakan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah tuntutan yang tidak terelakkan. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah timbulnya *fraud* antara lain melalui peningkatan *internal control*, pembentukan komite audit serta peningkatan integritas moral karyawan dan manajemen perusahaan.
- c. *Fraud* juga dapat terjadi akibat adanya kolusi antara auditor independen (Akuntan publik) dengan manajemen suatu perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi auditor independen dalam melakukan audit di perusahaan serta pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang.

## Referensi

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley..*Auditing & Assurance Services An Integrated Approach*. 10<sup>th</sup> edition.Prentice Education International. 2005.
- Accounting Standard Board (ASB).Statement on Auditing Standard (SAS) No. 53."*The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities*." 1988.
- ASB. SAS No. 55. "*Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit*."1988.
- ASB. SAS No. 78. "*Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit*."1997.
- ASB. SAS No. 82. "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*". 1997.
- ASB. SAS No. 99. "*Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*". 2002.
- Dooley, Daniel V. dan Skalak, S. L. Skalak. "*Financial Reporting Fraud and The Capital Markets*". A Guide to Forensic Accounting Investigation. 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Standar Profesional Akuntan Publik". Jakarta: Salemba Empat.
- International Standards on Auditing ("ISA") seksi 240 "*The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements*".
- Jusuf, Al Haryono. 2001. *Auditing (Pengauditan)*. Buku 1.Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mancino, June."The Auditor and *Fraud*." *Journal of Accountancy* .April 1997.
- Ramos, Michael. "Auditors' Responsibility for *Fraud* Detection." Adapted from *Fraud Detection in a GAAS Audit—SAS No. 99 Implementation Guide, Journal of Accountancy*. Online Issues, January 2003.
- Rezaee, Zabihollah. *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. John Wiley & Sons.August2002.